



RENCANA
KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN
NIAS SELATAN
TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. R. A Kartini No. 31 Telukdalam, Kab. Nias Selatan (22865)

Teluk Dalam, 31 Juli 2023

Nomor : 140/971 /DPMD/2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Renja DPMD
Tahun 2024

Kepada Yth:
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
C.q. Kepala Bappeda
Kabupaten Nias Selatan
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050/13408/Bappeda/D/2023 tertanggal 25 Juli 2023 perihal Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan (turut terlampir).

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Nias Selatan



ALBERT DUHA, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760620 200112 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Nias Selatan (sebagai laporan);
2. Arsip.-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan selama satu tahun anggaran. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kepada masyarakat penggunaanya.

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nias Selatan ini, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Teluk Dalam, 31 Juli 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Nias Selatan,



ALBERT DUHA,SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760620 200112 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN.....

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan.....

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

**BAB
I****PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan.

Penyusunan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memuat rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Nias Selatan selama kurun waktu satu tahun kedepan. Selanjutnya secara teknis operasional disusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah (RKA SKPD) ini merupakan bagian dari proses penyusunan rencana anggaran dan belanja daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan ini merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memberikan arahan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik di bidang sosial budaya, kelembagaan ekonomi maupun teknologi terapan

sehingga masyarakat dapat mengaktualisasi diri, meningkatkan harkat dan martabatnya serta mengembangkan kemandirian secara maksimal.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dan Program Strategis Nasional Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

Renja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Selatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan Daerah serta berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Nias Selatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_ 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
19. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2023 tentang tim penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan serta sebagai acuan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sedangkan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yang berbasis kinerja;
2. Sebagai panduan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat secara singkat tingkat pelayanan perangkat daerah, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan tugas dan dampaknya terhadap pencapaian visi misi, isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Memuat kajian perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, catatan penting atas perbedaan kajian dengan rancangan awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, pikir-pikir DPRD maupun hasil musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menguraikan tujuan dan sasaran atas rumusan rencana kerja perangkat daerah berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dan target indikator Renstra.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

Terhadap rumusan program dan kegiatan, Rekapitulasi program, Kegiatan dan pagu indikatif rencana kerja.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Evaluasi pelaksanaan renja-PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan 2021-2026. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assesmen) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi renja-PD tahun lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan telah mencapai nilai capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 100% dengan predikat “tinggi” dan nilai capaian kinerja program/kegiatan (output) rata-rata sebesar 100% dengan predikat “tinggi” adapun realisasi anggaran belanja operasional sebesar **Rp. 999.911.692 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)**, atau sebesar 90,24% dari pagu anggaran setelah perubahan (DPPA) sebesar **Rp. 1.108.112.150 (satu miliar seratus delapan juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah)**.

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan didukung oleh 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan proyeksi capaian indikator kinerja hingga triwulan II sebagai berikut :

2.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Outcome “ Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan dengan target kinerja Program 100%, terealisasi 50%

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan dengan target output 10 Dokumen dan 5 Laporan dan terealisasi 5 Dokumen yaitu RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sehingga capaian kinerja diperoleh 50% dengan rincian sub kegiatan dan realisasi output :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun : 2 Dok

b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun : 1 Dok

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun : 0 Dok

d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun : 1 Dok

e. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD

Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun : 0 Dok

f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun : 0 Lap

- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun : 0 Lap
- 2. Kegiatan adminitrasi keuangan perangkat daerah
Terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah” dengan target output 100% dan telah terealisasi 50%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN:
Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun telah terealisasi 50%
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD
Jumlah pelaporan keuangan akhir yang tersusun : 0 Lap
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
Jumlah pelaporan keuangan triwulan yang tersusun : 1 Lap.
- 3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian perangkat daerah” dengan target output 100% dan telah terealisasi 100%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya : 23 stel
- 4. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum perangkat daerah” dengan target output 100% dan telah terealisasi 100%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan : 1 Paket
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : 1 Paket
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan : 1 Paket
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : 1 Paket
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah : 40%
5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan” dengan target output 100% dan terealisasi 0%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :
- a. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan : 0 Unit
6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah” dengan target output 100% dan terealisasi 50%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan : 1 Laporan

b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan : 8 Laporan

7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “cakupan pengelolaan barang milik daerah” dengan target output 100% dan terealisasi 30%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :

a. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara : 1 Unit

2.1.2. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Outcome “ Persentase aparatur pemerintahan desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa” dengan target kinerja Program 100%, terealisasi 20%

1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa

Terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan dengan target output 100 % dan terealisasi 20% yaitu pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sehingga capaian kinerja diperoleh 20% dengan rincian sub kegiatan dan realisasi output :

a. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa

Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa : 0 Dokumen

- b. Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa : 459 Dokumen
- c. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa
Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa : 3 Dokumen
- d. Kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa : 0 Laporan
- e. Kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa
Jumlah dokumen profil desa yang tersusun : 0 Dokumen
- f. Kegiatan fasilitasi manajemen pemerintah desa
Jumlah dokumen hasil fasilitasi manajemen pemerintah desa : 0 Dokumen
- g. Kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa
Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa : 10 Dokumen
- h. Kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD
Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas : 0 Orang

2.1.3. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Outcome “ Persentase konsistensi program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat” dengan target kinerja Program 100%, terealisasi 30%

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat

yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan dengan target output 100 % dan terealisasi 30% yaitu “Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ” sehingga capaian kinerja diperoleh 30% dengan rincian sub kegiatan dan realisasi output :

- a. Kegiatan fasilitasi penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

Jumlah Dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan : 50 Dok

- b. Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan : 10 Desa

- c. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaa Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

Jumlah Sarana dan Prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan : 20 Desa

- d. Kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

Jumlah Dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kesejahteraan Keluarga : 2 Dok

Untuk selengkapnya hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai Triwulan II dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Kabupaten Nias Selatan

Nama PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %		100 %	99 %	99%	100 %	40 %	40%
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	56 Dok		11 Dok	11 Dok	100%	11 Dok	22 Dok	39%
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	36%
5 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
5 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
5 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
5 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%

5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Lap		1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	2	Lap	40%
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Lap		4	Lap	4	Lap	100%	4	Lap	8	Lap	40%
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	105	Dok		20	Dok	20	Dok	100%	29	Dok	49	Dok	47%
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	Org/Bltn		23	Org/Bltn	23	Org/Bltn	100%	23	Org/Bltn	23	Org/Bltn	100%
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap		1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	2	Lap	40%
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Lap		4	Lap	4	Lap	100%	12	Lap	16	Lap	80%
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok		0	Dok	0	Dok	0%	0	Dok	0	Dok	0%
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	31	Org		23	Org	23	Org	0%	23	Org	1	Org	3%
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	31	stel		23	stel	23	stel	0%	23	stel	23	stel	74%
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Org		0	Org	0	Org	0%	0	Org	0	Org	0%
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	40	%	40%

5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	80%
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	40%
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	40%
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 Lap		200 Lap	160 Lap	80%	400 Lap	560 Lap	75%
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	15 Unit		2 Unit	0 Unit	0%	2 Unit	2 Unit	13%
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit		2 Unit	2 Unit	0%	2 unit	4 unit	80%
5	01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit		2 Unit	2 Unit	0%	2 unit	4 unit	80%
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	1 Paket	100%
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan	1 unit		0 Unit	0 Unit	0%	0 unit	0 unit	0%
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %		100 %	99 %	99%	100 %	50 %	50%
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Lap		240 Lap	200 Lap	83%	120 Lap	320 Lap	53%
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap		12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	24 Lap	40%

5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Lap		8 Lap	8 Lap	100%	8 Lap	16 Lap	100%
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	5 Unit		5 Unit	1 Unit	20%	1 Unit	2 Unit	40%
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	1 Unit	20%	1 Unit	2 Unit	40%
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase konsistensi program Penataan Desa	100 %		100 %	100 %	100%	0 %	20 %	20%
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Konsistensi Program Penyelenggaraan Penataan Desa	459 Desa		5 Desa	0 Desa	0%	0 Desa	0 Desa	0%
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	200 Desa		1 Desa	0 Desa	0%	0 Desa	0 Desa	0%
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	459 Desa		1 Desa	0 Desa	0%	0 Desa	0 Desa	0%
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	459 Desa		1 Desa	0 Desa	0%	0 Desa	0 Desa	0%
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	80 Desa		1 Desa	0 Desa	0%	0 Desa	0 Desa	0%
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	100 Unit		1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase konsistensi Program Peningkatan Kerjasama Desa	100 %		100 %	100 %	100%	0 %	20 %	20%
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa yang memiliki kerjasama antar desa	5 Desa		3 Desa	0 Desa	0%	0 Desa	0 Desa	0%

2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Desa		1 Desa	0 Desa	0%	0 Desa	0 Desa	0%
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Desa		1 Desa	0 Desa	0%	0 Desa	0 Desa	0%
2	13	03	2.01	04	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 Desa		1 Desa	0 Desa	0%	0 Desa	0 Desa	0%
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase konsistensi program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	40 %	40%
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Konsistensi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	797 Dok		931 Dok	8 Dok	1%	8 Dok	16 Dok	2%
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	59 Dok		12 Dok	10 Dok	83%	12 Dok	22 Dok	37%
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	100 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0 Dok	0%
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	459 Dok		459 Dok	300 Dok	65%	150 Dok	450 Dok	98%
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	459 Dok		459 Dok	250 Dok	54%	150 Dok	400 Dok	87%
2	13	04	2.02	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1377 Orang		1 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
2	13	04	2.02	03	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40 Lap		0 Lap	0 Lap	#DIV/0!	Lap	0 Lap	0%
2	13	04	2.02	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	159 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0 Dok	0%

2	13	04	2.02	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Desa	65	Dok		20	Dok	15	Dok	75%	20	Dok	35	Dok	54%
5	01	03	2.02	08	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	5	Lap		0	Lap	0	Lap	#DIV/0!		Lap	0	Lap	0%
2	13	04	2.03	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5	Lap		1	Lap	0	Orang	0%	0	Lap	0	Lap	0%
2	13	04	2.03	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	Lap		1	Lap	1	Lap	100%	3	Lap	4	Lap	80%
2	13	04	2.03	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	60	Dok		12	Dok	0	Dok	0%	0	Dok	0	Dok	0%
2	13	04	2.03	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	50	Dok		10	Dok	10	Dok	100%	5	Dok	15	Dok	30%
2	13	04	2.03	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	225	Dok		45	Dok	40	Dok	89%	40	Dok	80	Dok	36%
2	13	04	2.03	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1377	Orang		918	Orang	459	Orang	50%	0	Orang	459	Orang	33%
2	13	04	2.03	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	60	Desa		12	Desa	0	Desa	0%	0	Desa	0	Desa	0%
2	13	04	2.03	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	40	Lap		10	Lap	0	Lap	0%	0	Lap	0	Lap	0%

2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Konsistensi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	50 %		5 %	6 %	120%	10 %	16 %	32%
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	9 Dok		20 Dok	1 Dok	5%	1 Dok	2 Dok	22%
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	3 Dok		0 Dok	0 Dok	#DIV/0!	Dok	0 Dok	0%
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Dok		20 Dok	20 Dok	100%	20 Dok	40 Dok	40%
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	459 Desa		200 Desa	159 Desa	80%	180 Desa	339 Desa	74%
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	120 Desa		20 Desa	0 Desa	0%	0 Desa	0 Desa	0%

2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7	Lap		1	Lap	0	Lap	0%	0	Lap	0	Lap	0%
5	05	02	2.04	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10	Dok		2	Dok	2	Dok	100%	3	Dok	5	Dok	50%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yang tertuang pada RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 serta regulasi terkait yang mengatur kinerja tersebut diatas, maka kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan terdiri atas 9 (sembilan) item indikator capaian kinerja pelayanan yaitu :

1. Nilai LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan

Penilaian AKIP mendatang berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yakni : Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan Surat dari Inspektorat No. : 700/699/ITKAB/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021, disebutkan bahwa nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan mendapatkan nilai 71,34 berkategori : B (Baik)

2. Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa

Persentase aparatur pemerintah desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi desa telah berhasil dilaksanakan dengan persentase **100%** dari target yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja yang ada.

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014). Hal ini tentu tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi “pejabat negara”. Walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa), Kepala Desa tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara.” Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa yang merepresentasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desanya.

Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah dan **tugas** pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan desa yang lebih baik dan berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat/desa.

Tata kelola administrasi pemerintahan desa yang lebih baik adalah pengelolaan semua aspek **pemerintahan desa** yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Agar roda pemerintahan dan administrasi desa berjalan lebih baik maka diperlukan kegiatan / fasilitasi dari pihak terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyelenggarakan kegiatan / fasilitasi dimaksud antara lain :

1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
2. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;

3. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa;
4. Fasilitasi pengelolaan aset desa;
5. Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa;

Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud di atas, tentunya sangat diperlukan sinergitas atau kerjasama stakeholder yang ada, agar pemerintahan di desa bisa terlaksana dengan baik. Namun demikian, pada proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi untuk melaksanakan kegiatan / fasilitasi ini antara lain :

- a. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa dengan baik;
- b. Masih minimnya dukungan dana dari Pemerintahan Daerah;
- c. Kurangnya SDM aparatur yang ada;
- d. Belum optimalnya kelembagaan yang ada di desa;

Tentunya, agar pencapaian kinerja ini tetap terlaksana dengan baik dan berkelanjutan untuk ke depannya, maka sangatlah dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah terutama dari segi pendanaan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa guna mengelola roda pemerintahan dan atau administrasi di desa dengan berkualitas baik, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

3. **Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis**

Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis“ tidak terlaksana dengan baik dengan persentase **0%** dari target kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana yang di terima oleh dinas PMD dan adanya prioritas kegiatan lain yang harus dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas baik, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi dinas PMD sebagai pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa terkait erat dengan misi ke – 1 Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu : ***“Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur dan transparan dan berorientasi pada pelayanan”***.

Oleh karena itu, demi meningkatkan kapasitas atau Sumber Daya Aparatur yang ada maka sangatlah diharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik dari ketersediaan Sumber Daya Manusia atau dukungan dana yang ada.

4. **Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa**

Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa dapat disimpulkan telah berhasil dan berjalan dengan baik dengan realisasi capaian kinerja **98%** dari target yang ada.

Desa adalah salah satu unit pemerintahan yang diselenggarakan oleh kepala desa dengan bantuan perangkat desa. Desa bukan lagi merupakan bawahan daerah melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan sebagai figuran dan objek namun berperan sebagai aktor. Kedudukan desa merupakan entitas politik otonom dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki regulasi sendiri dalam mengelola kehidupan desa.

Pelaksanaan otonomi desa tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk menguatkan kedudukan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa maka desa mendapatkan tambahan pendapatan sesuai dengan pasal 72 yaitu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut *Dana Desa*.

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan transfer yang dimiliki oleh Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas dalam penggunaan Dana Desa.

Ada 2 hal yang menjadi prinsip pengelolaan keuangan Desa :

a. Transparansi

Transparansi atau prinsip keterbukaan. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.

b. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, pengelolaan dan penyerapan Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan di lakukan berbasis aplikasi sebagai langkah nyata untuk mewujudkan prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik serta dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dimaksud bertujuan memudahkan pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan pemantauan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini yang melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan Dana Desa baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga Dana Desa yang disalurkan benar benar tepat pada sasarannya.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan ini, Dinas PMD melakukan berbagai upaya diantaranya :

- a. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan melakukan pembagian Zona/Wilayah kepada masing-masing aparaturnya pemerintahan yang ada, hal ini agar lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat/desa serta membantu terlaksananya pengelolaan dan penyerapan dana desa dengan baik;
- b. Mengadakan pelatihan singkat terkait dengan penggunaan aplikasi siskeudes baik secara online maupun offline;
- c. Menambah daya/kualitas sinyal pada jaringan internet kantor yang ada, agar lebih memudahkan koneksi ke aplikasi;
- d. Menambah perangkat komputer/desktop agar bisa menampung database desa.

Adapun permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ini untuk mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa serta penyerapan Dana Desa yang lebih baik diantaranya :

- a. Keterbatasan kapasitas SDM aparaturnya pemerintahan desa;
- b. Kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa dan penyerapan dana desa bagi aparaturnya pemerintahan Desa;
- c. Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan dan penyerapan Dana Desa masih dianggap rumit oleh Pemerintahan Desa;
- d. Keterbatasan anggaran fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa pada OPD Teknis di lingkungan Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten;
- e. Kurangnya sarana prasarana di kantor Desa terutama banyak yang belum di ideal kantor desanya.

Berikut ini besaran pagu Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Nias Selatan dari Tahun 2019-2022 beserta penyaluran dan penyerapannya antara lain :

No	Tahun Anggaran	Pagu DD	Penyaluran	Penyerapan
1	2	3	4	5
1.	TA. 2019	348.422.333.000	300.759.550.033	284.407.626.729
2.	TA. 2020	351.138.751.000	350.786.871.344	356.690.848.763
3.	TA. 2021	351.138.751.000	346.976.287.528	352.129.340.453
4.	TA. 2022	375.606.997.000	371.959.764.729	371.750.500.500

Sebagaimana yang tertera pada tabel diatas, besaran pagu Dana Desa dari Tahun ke Tahun mengalami kenaikan signifikan. Hal ini tidak diikuti dengan penyaluran ke masing-masing desa disebabkan karena masih ada desa yang tidak memenuhi syarat untuk penyaluran sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan dan aturan dari kementerian keuangan. Selanjutnya, Pada Tahun 2022 ini ada 9 (sembilan) desa yang tidak salur DD yakni :

1. Desa Bawootalua Kec. Lahusa;
2. Desa Orahili Balaekha Kec. Lahusa;
3. Desa Amandraya Kec. Amandraya;
4. Desa Hilizalootano Laowo Kec. Mazino;
5. Desa Bawofanayama Kec. Fanayama;
6. Desa Hilitoese Kec. Hilimegai;
7. Desa Koendrafo Kec. Lolomatua;
8. Desa Botohilindruria Kec. Lolomatua;
9. Desa Samadaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo;

5. Jumlah SOP yang diterapkan di Dinas PMD

Jumlah SOP yang diterapkan di dinas PMD telah berhasil terlaksana dengan baik dengan persentase **100%** dari target yang ada. Hal ini tidak lepas dari adanya komitmen dan integritas serta tanggungjawab dari aparatur pemerintah yang ada di Dinas PMD untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set).

SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun demikian SOP memiliki peran yang besar untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, SOP ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah dalam memperbaiki proses internal masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

SOP yang telah disusun digunakan sebagai pedoman/panduan bagi seluruh penyelenggara layanan (aparatur pemerintah yang ada di dinas PMD) sesuai dengan tugas dan fungsinya, penerima layanan (masyarakat/pemerintah desa) dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, guna terwujudnya kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan secara maksimal dan prima di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan dibuatnya SOP ini diharapkan mampu mencapai sasaran – sasaran yang telah ditentukan antara lain :

- Menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan;
- Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan yang ada di dinas PMD;
- Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit (nyata) untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi setiap usaha yang telah dilakukan;
- Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari segi mutu, waktu dan prosedur.

Adapun jenis SOP yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yakni **SOP Sekretariat Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan**.

6. Jumlah Desa percontohan yang melaksanakan 10 Program pokok PKK

Realisasi dari capaian kinerja ini dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kapasitas kelompok PKK berjalan dengan baik dengan persentase **100** dari target yang ada, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sebanyak 459 kelompok Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) desa aktif dalam melaksanakan kegiatannya dengan adanya dukungan Dana dari masing-masing Desa, dengan rincian :
 - b. Sebanyak 459 desa mempunyai susunan kepengurusan yang baik dan aktif dalam kegiatan pembinaan PKK di tingkat Desa;
 - c. Sebanyak 8 desa terpilih sebagai desa percontohan 10 program PKK, dimana terdapat program unggulan yang memang merupakan ciri khas gerakan PKK untuk mencapai visi dan misinya yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran tim sampai dengan kelompok-kelompok PKK Desa sesuai dengan peran, fungsi dan kapasitasnya masing-masing. Program unggulan ini dikategorikan sebagai program prioritas. Adapun 8 (empat) desa dimaksud yakni :
 1. **Desa Maluo Kecamatan Hilisalawa'ahe** dengan program unggulan :
 - a. Pemanfaatan Lahan melalui Program Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK;
 - b. Pola Asuh Anak dan Remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga.
 2. **Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama** dengan program unggulan :
 - a. Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

3. **Desa Tuindrao I Kecamatan Amandraya** dengan program unggulan :
 - a. Pemanfaatan Lahan melalui Program Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK
 4. **Desa Hiliadulo Kecamatan Hilimegai** dengan program unggulan :
 - a. Pemanfaatan Lahan melalui program Asri Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK
 5. **Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo** dengan program unggulan :
 - a. Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)
 6. **Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo** dengan program unggulan :
 - a. Kelestarian Lingkungan Hidup
 7. **Desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama** dengan program unggulan :
 - a. Program pembuatan rumah bibit tanaman pangan
 8. **Desa Bawonahono Kecamatan Fanayama** dengan program unggulan :
 - a. Program IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) Test, merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kompetensi Tim Penggerak PKK dan kader dalam mendukung pencapaian gerakan PKK. Gerakan PKK dimaksud adalah gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.

Sebagaimana pada poin a dan b diatas, diperlukan adanya kerjasama dari beberapa unsur kementerian dan Lembaga selaku Pembina TP-PKK serta adanya dukungan dana yang memadai agar lebih mengefektifkan sasaran dan pencapaian program kerja PKK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

7. **Persentase BUMDesa yang aktif**

Capaian indikator kinerja tercapai dan terealisasi sebesar **100%** dari target yang ada, yakni dengan adanya 22 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif di Kabupaten Nias Selatan. Adapun yang menjadi tolak ukur BUMDesa aktif dan dikelola dengan baik adalah :

- a. Memiliki manajemen BUMDesa yang baik, misalnya : Kelengkapan AD/ART, adanya SOP (standar, operasional dan prosedur) yang diterapkan pada pengelolaan BUMDesa, rekrutmen pengelola BUMDesa dilaksanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang rutin dilaksanakan;
- b. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta mempunyai kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Menciptakan adanya Pendapatan Asli Desa sehingga memungkinkan desa untuk mandiri dalam perekonomian;
- d. Tersedianya kantor dan fasilitas kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang memadai;
- e. Memiliki laba/ keuntungan dari BUMDesa yang dibentuk serta adanya penambahan jumlah unit usaha dari sebelumnya;
- f. Adanya kemitraan/kerjasama BUMDesa dengan pihak swasta/pemerintah untuk menunjang berkembangnya BUMDesa yang ada;
- g. Tersedianya gaji pengelola BUMDesa dari hasil usaha dan keunikan produk yang ada;

Dari 38 BUMDesa yang sudah terbentuk di Kabupaten Nias Selatan, sebanyak 22 BUMDesa aktif dan dikelola dengan baik. Berikut daftar nama BUMDesa dan jenis usaha yang dilaksanakan, antara lain :

No.	Nama BUMDes	Desa/Kec	Jenis Usaha
1.	Batu Ofulo	Hilisimaetano – Maniamolo	Supplier Obat-Obatan dan Pupuk Pertanian, penampung hasil bumi
2.	Solid Lagundri	Lagundri – Luahagundre Maniamolo	Simpan Pinjam
3.	Hele Batu	Bawomaenamolo – Luahagundre Maniamolo	Toko Obat Pertanian
4.	Lolomoyo Mandiri	Lolomoyo – Amandraya	-
5.	Wojui Jibaga Sisarahili	Sisarahili – Pulau Pulau Batu	-
6.	Faosara Dodo	Hilifalago Raya – Onolalu	Usaha sewa menyewa barang, air bersih
7.	Cahaya Baru	Tetezou – Lahusa	Depot isi ulang air minum
8.	Daro Daro Balaekha	Hiliabolota – Lahusa	-
9.	Serumpun	Bawoamahelato – Pulau Pulau Batu	-
10.	Naru'u	Golambanua II – Somambawa	-
11.	Fari'i	Hilimbowa Siwalawa – Lolowau	Perdagangan sembako, wisata pantai
12.	Fahasara Dodo	Nituwu Boho – Lolowau	Peternakan Babi
13.	Muzawa V	Lolowau – Lolowau	-
14.	Salo'o	Bawosalo'o Siwalawa – Lolowau	Pengangkutan
15.	Howu Howu	Tuho'owo – Hilimegai	Simpan Pinjam
16.	Totonafo Zato	Soledua – Hilimegai	-
17.	Zumali	Onohondro – Fanayama	-
18.	Eho	Majino Lorang – Pulau Pulau Batu Utara	-
19.	Sondorogo Sisiwa Ewali	Sisiwa Ewali – Uluidanotae	Usaha simpan pinjam, BBM, perkakas pesta, perdagangan,

			transportasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan wisata desa
20.	Ose Nowi	Lahusa Fau – Fanayama	-
21.	Bulusa	Bawomataluo – Fanayama	-
22.	Harapan Baru	Orahili Sibohou – Gomo	Pasar desa, simpan pinjam, sembako, jasa transportasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDesa yang ada di Kabupaten Nias Selatan mayoritas banyak bergerak di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes sebagai berikut :

a. Masalah Pengaturan Organisasi;

Pengaturan organisasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha. Pengelolaan organisasi yang baik akan mendorong kemajuan dan perkembangan usaha. Tidak sedikit BUMDes yang akhirnya tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes. Meskipun kepengurusan BUMDes sudah dibentuk, namun pada implementasinya, pengurus BUMDes belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

b. Menemukan dan mengembangkan potensi desa;

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Masing-masing desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan, entah itu potensi dalam bidang sumber daya alam (wisata alam, pertanian, dll) ataupun potensi dalam bidang sumber daya manusia (kerajinan, jasa, dll). Tantangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa bisa dikatakan sulit, karena menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidaklah mudah.

Banyak diantara mereka yang tidak mau mengembangkan potensi yang dimiliki desa dengan berbagai alasan. Perlu sekali dilakukan sosialisasi dan pelatihan SDM untuk merubah cara berpikir masyarakat agar mau diajak mengelola potensi yang dimiliki desa secara bersama-sama.

c. **Masalah Promosi**

BUMDes yang pengelolaannya sudah baik serta memiliki output yang berkualitas seringkali masih kesulitan dalam perihal promosi. Hal tersebut tentunya membuat kepengurusan BUMDes harus benar-benar mampu melihat peluang dan pintar dalam mencari cara untuk melakukan promosi. Sebab akan menjadi percuma jika potensi desa sudah disulap menjadi produk namun tidak dapat terdistribusi dengan baik hanya karena masalah promosi yang kurang baik.

d. **Kurangnya dukungan pendanaan dan dukungan aset dari Pemerintah Desa serta dari Pemerintah Pusat**

8. **Persentase Pengentasan Daerah Tertinggal**

Persentase pengentasan daerah tertinggal dapat disimpulkan telah berhasil dilaksanakan dengan persentase **31%** dari target yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pemutakhiran data Indeks Desa membangun pada Tahun 2022 yang menunjukkan peningkatan dari status desa yang ada.

9. **Jumlah Desa Tertinggal**

Jumlah Desa tertinggal dapat disimpulkan telah berhasil dilaksanakan dengan berjumlah 142 dari 459 Desa. Hal ini tidaklah lepas dari penggunaan prioritas penggunaan Dana Desa yang di sasarankan pada pembangunan Sumber Daya yang ada di Desa terutama pada Program Padat Karya Tunai Desa sehingga Jumlah Desa tertinggal semakin kecil bila dibandingkan dengan Tahun Tahun sebelumnya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Nias Selatan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LAKIP			C	CC	B	B	C	C	B	B	
2	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis			5%	10%	20%	25%	0%	0%	10%	10%	
4	Persentase Pengelolaan dan Penyerapan Dana Desa			100%	100%	100%	100%	90%	85%	100%	100%	
5	Jumlah SOP yang diterapkan di dinas PMD			1	2	2	3	0	1	2	3	
6	Jumlah desa percontohan yang melaksanakan 10 program pokok PKK			8	12	16	20	5	10	20	30	
7	Persentase BUMDesa yang aktif			58%	67%	76%	85%	20%	68%	60%	65%	
8	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		✓	23,29%	24,66%	26,03%	27,40%	30%	31%	31%	31%	
9	Jumlah Desa tertinggal		✓	130	140	140	148	142	142	128	120	

2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Tantangan dan Peluang

Adapun beberapa tantangan yang menjadi kendala atau tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan paradigma dari Pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance) yakni dari hak eksklusif Negara untuk mengatur hal-hal public menjadi persoalan -persoalan public menjadi urusan Bersama antara Pemerintah Daerah, Civil Society dan dunia usaha/swasta;
- b. Pergeseran Paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada Tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada Tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir Tahun 1990-an hingga sampai saat ini, sehingga diperlukan peningkatan Kapasitas SDM (Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa), beserta Lembaga kemasyarakatan di Desa. sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif (Kerjasama);
- c. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan Langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- d. Di era Globalisasi dan Digital saat ini, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya baik melalui sarana digital yang ada maupun non digital;
- e. SDA yang melimpah belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- f. Dinamika pembangunan perdesaan yang bergerak progresif membutuhkan Langkah antisipasi, fasilitasi dan asistensi dengan berdasarkan standar kompetensi;

- g. Perkembangan digitalisasi ekonomi yang merambah perdesaan, sangat membutuhkan adaptasi program pengembangan kelembagaan dan aktivitas produktif ekonomi perdesaan;
- h. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- i. Keterbatasan data dan informasi pembangunan masing-masing Desa;
- j. Penguatan kapasitas pemerintahan Desa dan kelembagaan masyarakat Desa membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.

Jika diatas telah diuraikan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan dalam pengembangan pelayanannya, maka di bawah ini akan diuraikan juga beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan meliputi :

- a. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
- b. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Keterbukan informasi dan teknologi informasi yang terus berkembang;
- d. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- e. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- f. Tingginya respon perempuan dalam berorganisasi dan aktif dalam kegiatan PKK di Desa;
- g. Terselenggarannya Peningkatan profesionalisme pengelolaan pembangunan dan penganggaran Desa berbasis digital melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES), Online Monitoring-Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (Om-SPAN), Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADes) serta aplikasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa;

- h. Terselenggaranya Kerjasama dengan elemen masyarakat sipil yang memungkinkan berkembangnya pembangunan Desa dan pengawasan tata Kelola penganggaran Desa.

2.3.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Adapun yang menjadi rekomendasi dan tindak lanjut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dalam urusan perencanaan pembangunan di desa serta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa adalah :

- a. Penempatan aparatur pemerintahan pemerintahan sesuai dengan bidangnya;
- b. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan produktivitas masyarakat desa;
- d. Menyediakan fasilitas pembangunan & meningkatkan infrastuktur desa;
- e. Memberikan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat desa yang memiliki potensi menjadi kader pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa.

2.4. REVIU TERHADAP RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan RPJMD tahun ke 2. Sesuai dengan agenda pembangunan daerah yang termuat didalam RPJMD, maka Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 diarahkan untuk menyukseskan agenda tersebut.

Berdasarkan Tabel 2.3, maka hasil revidi terhadap RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Nias Selatan

Nama PD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMD	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	1.808.092.547,50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMD	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	1.483.342.474,00	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 Dok	35.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12 Dok	35.000.000,00	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	5.000.000,00	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5.000.000,00	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.000.000,00	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	5.000.000,00	
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	5.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	5.000.000,00	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	5.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	5.000.000,00	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	6 Dok	216.742.474,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	29 Dok	214.742.474,00	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Org/Bln	204.240.124,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Org/Bln	204.240.124,00	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	5.000.000,00	
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas PMD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	5.502.350,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas PMD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	5.502.350,00	
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	2.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dok	-	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	25 Org	145.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	23 Org	175.000.000,00	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	25.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas PMD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Org	120.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas PMD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	150.000.000,00	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMD	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	769.250.073,50	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMD	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	550.000.000,00	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000,00	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	178.752.273,50	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	120.000.000,00	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.497.800,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 Lap	500.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Lap	350.000.000,00	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMD	Jumlah pengadaan barang milik daerah	1 Unit	280.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMD	Jumlah pengadaan barang milik daerah	3 Unit	340.000.000,00	
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas PMD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	280.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas PMD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	280.000.000,00	
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	35.000.000,00	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Dinas PMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket		Pengadaan Mebel	Dinas PMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Dinas PMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Dinas PMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	0 Paket	-	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMD	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	212.100.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMD	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	118.600.000,00	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Lap	4.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Lap	4.500.000,00	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Lap	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	2.500.000,00	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Lap	207.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Lap	111.600.000,00	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMD	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1 Unit	150.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMD	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1 Unit	50.000.000,00	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas PMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas PMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.000.000,00	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas PMD	Persentase konsistensi program penataan Desa	100 %	-	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas PMD	Persentase konsistensi program penataan Desa	100 %	-	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas PMD	Jumlah desa yang melakukan penataan desa dengan baik	0 Desa	-	Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas PMD	Jumlah desa yang melakukan penataan desa dengan baik	0 Desa	-	
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0 Desa	-	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0 Desa	-	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0 Desa	-	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0 Desa	-	
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	0 Desa	-	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	0 Desa	-	
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0 Desa	-	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0 Desa	-	
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dinas PMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	0 unit	-	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dinas PMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	0 Unit	-	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Dinas PMD	Persentase konsistensi Program Peningkatan Kerjasama Desa	100 %	55.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Dinas PMD	Persentase konsistensi Program Peningkatan Kerjasama Desa	100 %	-	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerjasama Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang memiliki kerjasama antar desa	45 Desa	55.000.000,00	Fasilitasi Kerjasama Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang memiliki kerjasama antar desa	0 Desa	-	
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD	Jumlah dokumen kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25 Dok	25.000.000,00	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD	Jumlah dokumen kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0 Dok	-	
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD	Jumlah dokumen kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Dok	10.000.000,00	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD	Jumlah dokumen kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	0 Dok	-	
2	13	03	2.01	04	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas PMD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	20 Dok	20.000.000,00	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas PMD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	0 Dok	-	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas PMD	Persentase konsistensi program adminitrasi Pemerintahan Desa	100 %	1.530.000.000,00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas PMD	Persentase konsistensi program adminitrasi Pemerintahan Desa	100 %	1.870.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	Persentase Konsistensi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	159 Dok	1.530.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	Persentase Konsistensi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	159 Dok	1.870.000.000,00	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Dok	100.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Dok	130.000.000,00	
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	0 Dok	-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	0 Dok	-	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100 Dok	100.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	150 Dok	120.000.000,00	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	400 Dok	240.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	459 Dok	350.000.000,00	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas PMD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1377 Orang	350.000.000,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas PMD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1377 Orang	500.000.000,00	
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 Dok	-	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 Dok	-	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Desa	80 Dok	180.000.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Desa	100 Dok	280.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dinas PMD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Lap	-	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dinas PMD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Lap	-	
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dinas PMD	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50 Lap	20.000.000,00	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dinas PMD	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Lap	-	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Profil Desa	100 Dok	20.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Profil Desa	0 Dok	-	
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	350 Dok	150.000.000,00	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	50 Dok	40.000.000,00	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	459 Dok	200.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	459 Dok	200.000.000,00	
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dinas PMD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	918 Orang	150.000.000,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dinas PMD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1377 Orang	250.000.000,00	
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50 Desa	20.000.000,00	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 Desa	-	
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dinas PMD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 Lap	-	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dinas PMD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 Lap	-	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas PMD	Persentase Konsistensi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	10 %	810.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas PMD	Persentase Konsistensi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	10 %	1.000.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMD	Persentase Konsistensi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dok	810.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMD	Persentase Konsistensi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	0 Dok	1.000.000.000,00	
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Dok	120.000.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	120 Dok	180.000.000,00	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	359 Desa	350.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	459 Desa	500.000.000,00	
2	13	05	2.02	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	459 Desa	120.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	459 Desa	120.000.000,00	
2	13	05	2.03	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas PMD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100 Lap	100.000.000,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas PMD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 Lap	-	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	05	2.03	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200 Dok	120.000.000,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200 Dok	200.000.000,00	
					TOTAL				4.148.092.547,50	TOTAL				4.353.342.474,00	

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 35.000.000;

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 35.000.000

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
4. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 216.742.742;

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 dibawah Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 214.742.474.

Hal ini disebabkan karena kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran telah dihapuskan.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 145.000.000;

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 diatas Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 175.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pagu dana kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan bahan logistik kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 769.250.074;

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 dibawah Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 550.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pagu dana kegiatan pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dan penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 280.000.000;

- ❖ Hasil Reviu :
Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 diatas Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 340.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya pengalokasian pagu dana kegiatan yang sudah ada meliputi pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pengadaan mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Rancangan RKPD :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 212.100.000
 - ❖ Hasil Reviu :
Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 dibawah Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 118.600.000. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pagu dana kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- G. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - ❖ Rancangan RKPD :
 1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 150.000.000;
 - ❖ Hasil Reviu :
Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 dibawah Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 50.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pagu dana pada kegiatan tersebut.

II. PROGRAM PENATAAN DESA

A. Penyelenggaraan Penataan Desa

- ❖ Rancangan RKPD :
 1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

2. Fasilitas tata wilayah desa
3. Fasilitas penataan kewenangan desa
4. Fasilitas penamaan dan Kode Desa
5. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 0,00

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 0,00. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan yang menjadi prioritas atau kebutuhan perangkat daerah untuk dilaksanakan.

III. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

A. Fasilitas Kerjasama Antar Desa

❖ Rancangan RKPD :

1. Fasilitas Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
2. Fasilitas Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
3. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 0,00

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 0,00. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan yang menjadi prioritas atau kebutuhan perangkat daerah untuk dilaksanakan.

IV. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

❖ Rancangan RKPD :

1. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan desa
4. Fasilitas pengelolaan keuangan desa
5. Pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
7. Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
8. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
9. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
10. Fasilitasi penyusunan profil desa
11. Fasilitasi manajemen pemerintah Desa
12. Fasilitasi pengelolaan aset desa
13. Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD
14. Fasilitasi penetapan dan penegasan Batas Desa
15. Fasilitasi pembinaan laporan Kepala Desa

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 1.530.000.000;

❖ Hasil Reviu

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 diatas Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 1.870.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pagu pada kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- A. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota

❖ Rancangan RKPD :

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat
2. Peningkatan kapsitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat

3. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
5. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal RKPD sebesar Rp. 810.000.000;

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 diatas Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 Reviu Terhadap
RKPD Tahun 2024 Kabupaten Nias Selatan

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berkewajiban juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

**BAB
III****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah mendukung pencapaian target pembangunan sosial sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri di Indonesia sementara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memprioritaskan pengentasan/penurunan jumlah Desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi Desa berkembang dan seterusnya menjadi Desa maju dan mandiri. Dan disisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan juga melaksanakan program dan kegiatan yang sama dalam rangka mendukung pembangunan nasional terkait peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penataan dan Penyelenggaraan Administrasi Desa serta pengelolaan keuangan dan aset Desa.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan -masukan dari stakeholders, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan memiliki 1 (satu) tujuan yang harus dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

“ Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Desa yang berkualitas baik dan berorientasi pada pelayanan ”

Dalam mendukung kedua tujuan diatas, maka yang menjadi sasaran jangka menengah Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas dan bertanggungjawab;
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan Kawasan perdesaan.

Dengan sasaran sebagaimana dimaksud diatas, akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik , terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan :

- ✓ Nilai LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- ✓ Persentase aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan Desa
- ✓ Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis
- ✓ Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa
- ✓ Jumlah SOP yang diterapkan Dinas PMD
- ✓ Jumlah Desa percontohan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK
- ✓ Persentase BUMDesa yang aktif
- ✓ Persentase pengentasan Desa tertinggal
- ✓ Jumlah Desa tertinggal

**BAB
IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH****4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2024 adalah dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
11. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14. Penyediaan bahan logistic kantor
15. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
16. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
17. Pengadaan mebel
18. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
19. Penyediaan jasa surat menyurat

20. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
21. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
22. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
23. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
24. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program administrasi pemerintahan desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
2. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa
4. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa
5. Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
6. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
7. Fasilitasi penyusunan profil Desa
8. Fasilitasi pengelolaan aset Desa
9. Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD
10. Fasilitasi penegakan dan penetapan batas desa

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
3. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun Rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun Anggaran 2024 disusun sebagaimana **tabel 4.1** yang terlihat di bawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Nias Selatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Dinas PMD	100 %	750.000.000,00	DAU		100 %	1.195.400.000,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Dinas PMD	12 Dok	25.100.000,00	DAU		11 Dok	33.500.000,00
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMD	2 Dok	3.100.000,00	DAU		2 Dok	5.000.000,00
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMD	1 Dok	4.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMD	1 Dok	4.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas PMD	1 Dok	4.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMD	1 Dok	4.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMD	1 Lap	2.500.000,00	DAU		1 Lap	3.500.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	1 Paket	10.000.000,00	DAU		1 Paket	10.000.000,00
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	12 Paket	80.000.000,00	DAU		12 Paket	150.000.000,00
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PMD	12 Paket	15.000.000,00	DAU		12 Paket	20.000.000,00
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMD	300 Lap	350.000.000,00	DAU		400 Lap	500.000.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Dinas PMD	5 Unit	25.000.000,00	DAU		8 Unit	105.000.000,00
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas PMD	3 Paket	15.000.000,00	DAU		6 Paket	70.000.000,00
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas PMD	2 Unit	10.000.000,00	DAU		2 Unit	35.000.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Dinas PMD	100 %	88.900.000,00	DAU		100 %	88.900.000,00
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMD	250 Lap	2.500.000,00	DAU		250 Lap	2.500.000,00
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PMD	12 Lap	2.400.000,00	DAU		12 Lap	2.400.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	6 Lap	84.000.000,00	DAU		6 Lap	84.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Dinas PMD	14 Unit	28.000.000,00	DAU		14 Unit	43.000.000,00
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas PMD	1 Unit	15.000.000,00	DAU		1 Unit	15.000.000,00
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas PMD	12 Unit	3.000.000,00	DAU		12 Unit	3.000.000,00
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PMD	1 Unit	10.000.000,00	DAU		1 Unit	25.000.000,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase konsistensi program adminitrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	100 %	250.000.000,00	DAU	Prioritas	100% %	1.040.000.000,00
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Konsistensi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	100 %	250.000.000,00	DAU		100 %	1.040.000.000,00
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	159 Dok	10.000.000,00	DAU		159 Dok	10.000.000,00
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD	459 Dok	20.000.000,00	DAU		459 Dok	20.000.000,00
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas PMD	459 Dok	20.000.000,00	DAU		459 Dok	80.000.000,00

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Nias Selatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Dinas PMD	100 %	750.000.000,00	DAU		100 %	1.195.400.000,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Dinas PMD	12 Dok	25.100.000,00	DAU		11 Dok	33.500.000,00
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMD	2 Dok	3.100.000,00	DAU		2 Dok	5.000.000,00
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMD	1 Dok	4.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMD	1 Dok	4.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas PMD	1 Dok	4.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMD	1 Dok	4.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMD	1 Lap	2.500.000,00	DAU		1 Lap	3.500.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMD	4 Lap	3.500.000,00	DAU		4 Lap	5.000.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Dinas PMD	5 Dok	120.000.000,00	DAU		21 Dok	225.000.000,00
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMD	23 Org/Bln	100.000.000,00	DAU		23 Org/Bln	200.000.000,00
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMD	1 Lap	10.000.000,00	DAU		1 Lap	15.000.000,00
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas PMD	4 Lap	10.000.000,00	DAU		4 Lap	10.000.000,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PMD	23 Org	5.000.000,00	DAU		35 Org	15.000.000,00
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PMD	23 Paket	5.000.000,00	DAU		35 Paket	15.000.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Dinas PMD	100 %	458.000.000,00	DAU		100 %	685.000.000,00
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	1 Paket	3.000.000,00	DAU		1 Paket	5.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	1 Paket	10.000.000,00	DAU		1 Paket	10.000.000,00
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	12 Paket	80.000.000,00	DAU		12 Paket	150.000.000,00
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PMD	12 Paket	15.000.000,00	DAU		12 Paket	20.000.000,00
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMD	300 Lap	350.000.000,00	DAU		400 Lap	500.000.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Dinas PMD	5 Unit	25.000.000,00	DAU		8 Unit	105.000.000,00
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas PMD	3 Paket	15.000.000,00	DAU		6 Paket	70.000.000,00
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas PMD	2 Unit	10.000.000,00	DAU		2 Unit	35.000.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Dinas PMD	100 %	88.900.000,00	DAU		100 %	88.900.000,00
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMD	250 Lap	2.500.000,00	DAU		250 Lap	2.500.000,00
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PMD	12 Lap	2.400.000,00	DAU		12 Lap	2.400.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	6 Lap	84.000.000,00	DAU		6 Lap	84.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Dinas PMD	14 Unit	28.000.000,00	DAU		14 Unit	43.000.000,00
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas PMD	1 Unit	15.000.000,00	DAU		1 Unit	15.000.000,00
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas PMD	12 Unit	3.000.000,00	DAU		12 Unit	3.000.000,00
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PMD	1 Unit	10.000.000,00	DAU		1 Unit	25.000.000,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase konsistensi program adminitrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	100 %	250.000.000,00	DAU	Prioritas	100% %	1.040.000.000,00
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Konsistensi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	100 %	250.000.000,00	DAU		100 %	1.040.000.000,00
2	13	04	2.01	01	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	159 Dok	10.000.000,00	DAU		159 Dok	10.000.000,00
2	13	04	2.01	03	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD	459 Dok	20.000.000,00	DAU		459 Dok	20.000.000,00
2	13	04	2.01	04	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas PMD	459 Dok	20.000.000,00	DAU		459 Dok	80.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dinas PMD	918 Orang	50.000.000,00	DAU		918 Orang	100.000.000,00
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Desa	Dinas PMD	50 Dok	30.000.000,00	DAU		200 Dok	180.000.000,00
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dinas PMD	1 Laporan	50.000.000,00	DAU		5 Laporan	250.000.000,00
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dinas PMD	10 Dok	10.000.000,00	DAU		50 Dok	50.000.000,00
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dinas PMD	50 Dok	20.000.000,00	DAU		100 Dok	100.000.000,00
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dinas PMD	459 Orang	30.000.000,00	DAU		459 Orang	200.000.000,00
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Dinas PMD	10 Desa	10.000.000,00	DAU		50 Desa	50.000.000,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Konsistensi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	100 %	1.000.000.000,00	DAU	Prioritas	100 %	1.220.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	100 %	1.000.000.000,00	DAU		100 %	1.220.000.000,00
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	100 Dok	800.000.000,00	DAU		100 Dok	1.000.000.000,00
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas PMD	459 Desa	100.000.000,00	DAU		459 Desa	100.000.000,00
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	100 Desa	20.000.000,00	DAU		100 Desa	20.000.000,00
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD	459 Desa	80.000.000,00	DAU		459 Desa	100.000.000,00
TOTAL									2.000.000.000				

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-	4 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	5 Dokumen			-	120.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-	-	225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			12 Orang/bulan	100.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-	12 Orang/bulan	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan			4 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-	4 Laporan	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit			2 Unit	10.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2 Unit	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 sda			-	88.900.000,00			-	-	-	-	88.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1250 Laporan			250 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	250 Laporan	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	60 Laporan			12 Laporan	2.400.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Laporan	2.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	60 Laporan			6 Laporan	84.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	6 Laporan	84.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	10 Unit			-	28.000.000,00			-	-	-	-	43.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 Unit			1 Unit	15.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	15 Unit			12 Unit	3.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Unit	3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit			1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Dilatih Dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase BUMDes yang Aktif Persentase Pengelolaan dan Penyerapan Dana Desa/ADD Persentase konsistensi program administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen			100 Persen 75 Persen 100 Persen 100 Persen	230.000.000,00						100 Persen 75 Persen 100 Persen 100 Persen	990.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Konsistensi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase konsistensi program administrasi pemerintahan Desa Persentase Konsistensi Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen			100 Persen 100 Persen 100 %	230.000.000,00			-	-	-	100 Persen 100 Persen 100 %	990.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0 Dokumen			159 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	159 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	459 Dokumen			459 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	459 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	459 Dokumen			459 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	459 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1377 Orang			918 Orang	50.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	918 Orang	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	459 Dokumen			50 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	50 Dokumen	180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan, Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Dokumen			100 Dokumen	800.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	100 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.05.2.01.03		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	459 Lembaga			459 Lembaga	100.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	459 Lembaga	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.05.2.01.04		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	120 Unit			100 Unit	20.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	100 Unit	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.05.2.01.09		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	24 Dokumen			459 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	459 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		J U M L A H						2.000.000.000,00								3.405.400.000,00		

**BAB
V****PENUTUP****a. Catatan Penting dalam penyusunan Rencana Kerja**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi perangkat daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang Kecamatan di tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten di tingkat Kabupaten. Dan tentunya diperlukan koordinasi dan kolaboratif antar stakeholder atau lintas sektoral yang ada.

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan seluruh staf yang ada secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

- Melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Selanjutnya, dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Selanjutnya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 juga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dimana Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dalam penyusunan rencana pembangunan dimasa mendatang sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan masyarakat yang Maju, sejahtera dengan Kepemimpinan yang Melayani, Jujur, dan Sederhana.”

Telukdalam, 31 Juli 2023

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Nias Selatan,



ALBERT DUHA,SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760620 200112 1 002